

PENGARUH DPK, NPL, LDR DAN BI RATE TERHADAP JUMLAH KREDIT YANG DISALURKAN OLEH BPR DI PROVINSI BALI

Ni Luh Ita Nofita¹
A.A. Ketut Ayuningsasi²
I Wayan Yogi Swara³

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: itanofita2@gmail.com

ABSTRAK

BPR berperan penting dalam menggerakkan sektor perekonomian di Provinsi Bali melalui penyaluran kredit. Melalui pemberian kredit ini, sektor rumah tangga/perusahaan dapat menjalankan aktivitas perekonomian/bisnis, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi pihak-pihak lain. Pentingnya penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR tidak diimbangi oleh persentase pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh BPR di Provinsi Bali. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara serempak maupun parsial DPK, NPL, LDR dan BI Rate terhadap jumlah kredit yang disalurkan BPR di Provinsi Bali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif menggunakan analisis regresi linear berganda dan menggunakan data sekunder tahun 2008 triwulan I - 2017 triwulan III. Berdasarkan hasil pengujian, secara simultan DPK, NPL, LDR dan BI Rate secara serempak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. Secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan, NPL berpengaruh negative dan signifikan, LDR tidak berpengaruh, dan BI rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali.

Kata kunci : DPK, NPL, LDR, BI Rate, dan Kredit

ABSTRACT

BPR is useful in driving the economic sector in Bali Province through lending. Through taxes, this is a household business / company can run economic activities / business, can create jobs for other parties. The importance of credit distribution by BPR is not balanced by the percentage of credit growth disbursed by BPR in Bali Province. The purpose of this study is to know independently and partially DPK, NPL, LDR and BI Rate on the amount of credit disbursed by BPR in Bali Province. The approach used in this study is an associative approach so that multiple linear regression analysis and using secondary data in 2008 quarter I -2017 quarter III. Based on the results, simultaneously DPK, NPL, LDR and BI Rate simultaneously to the amount of credit disbursed by Rural Banks in Bali Province. Partially, DPK is positive and significant, NPL has negative and significant effect, LDR has no effect, and BI rate is positive and significant to the amount of credit disbursed by Rural Bank in Bali Province.

Kata kunci : DPK, NPLs, LDR, BI Rate and Credit

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan yang dapat meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia salah satu adalah perbankan. Perbankan memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia yaitu lembaga pendukung yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, baik dalam menghimpun menyalurkan dan mengatur dana masyarakat (Junita dan Abundanti, 2016). Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan keuangan dalam jangka panjang menunjukkan adanya hubungan kausalitas (Silvia et al., 2012). Perkembangan sektor keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas.

Indikator perkembangan sektor keuangan yang baik, dilihat dari pemanfaatan kredit oleh sektor swasta dan mendorong adanya aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia (Allow, 2016). Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dapat terjadi apabila ekspansi kredit yang dilakukan diimbangi dengan optimalisasi pemanfaatan kredit oleh sektor swasta (Angeles, 2015). Bank merupakan institusi keuangan paling efisien, terbesar, dan paling penting yang mempertemukan pihak yang bersedia menawarkan dana dengan pihak yang membutuhkan dana yang mampu mempengaruhi perekonomian (Banga, 2013).

Perekonomian dapat lebih dinamis, dan efisien apabila didukung oleh peran intermediasi keuangan yang dilakukan oleh perbankan (Anthony, 2012). Penyaluran kredit dianggap sebagai suatu indikator penting peranan bank dalam mendorong kegiatan ekonomi di negara berkembang (Nugraha dan Marino, 2013). Fungsi bank sangat dipengaruhi oleh kinerja bank, dimana kinerja bank yang baik akan mendorong

ekonomi yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang baik, sehingga kinerja bank dapat memberikan kontribusi pada fungsi bank yang lebih baik Ekinci (2016).

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang berwujud bank, bertindak sebagai lembaga intermediasi dalam keuangan mikro yang berfungsi melayani masyarakat kecil di pedesaan dengan usaha kecil yang dimilikinya. (Suhartini dan Yuta, 2014). BPR merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang menyediakan pinjaman untuk masyarakat menengah kebawah. Pinjaman yang diberikan oleh BPR merupakan bagian jasa keuangan berskala kecil yang ditujukan untuk masyarakat menengah yang tidak memiliki akses ke bank umum. Pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro yang sering disebut dengan *microfinance* adalah pinjaman kepada nasabah yang berpendapatan rendah untuk pengembangan usaha sendiri (Wiwin, 2012). BPR memainkan peran penting dalam mobilisasi dan alokasi sumber daya di suatu negara (Ibrahim, 2010).

BPR memiliki tantangan serius yang harus dihadapi, yaitu kredit macet dan rendahnya tingkat keuntungan dan simpanan, serta persaingan dengan bank komersil (Akotey, 2011). Hal ini dapat mengurangi kemampuan bank untuk memenuhi hutang jangka pendek yang tercermin dalam rasio likuiditas (Buyinza, 2010). Tabel 1.1 menunjukkan jumlah BPR di Indonesia pada tahun 2012 sampai tahun 2016 masih berfluktuasi. Meskipun jumlah BPR berfluktuasi, jumlah kantor BPR di Indonesia terus mengalami peningkatan. Melalui peningkatan jumlah bank diharapkan BPR mampu meningkatkan peran melalui penyaluran kredit kepada masyarakat secara optimal.

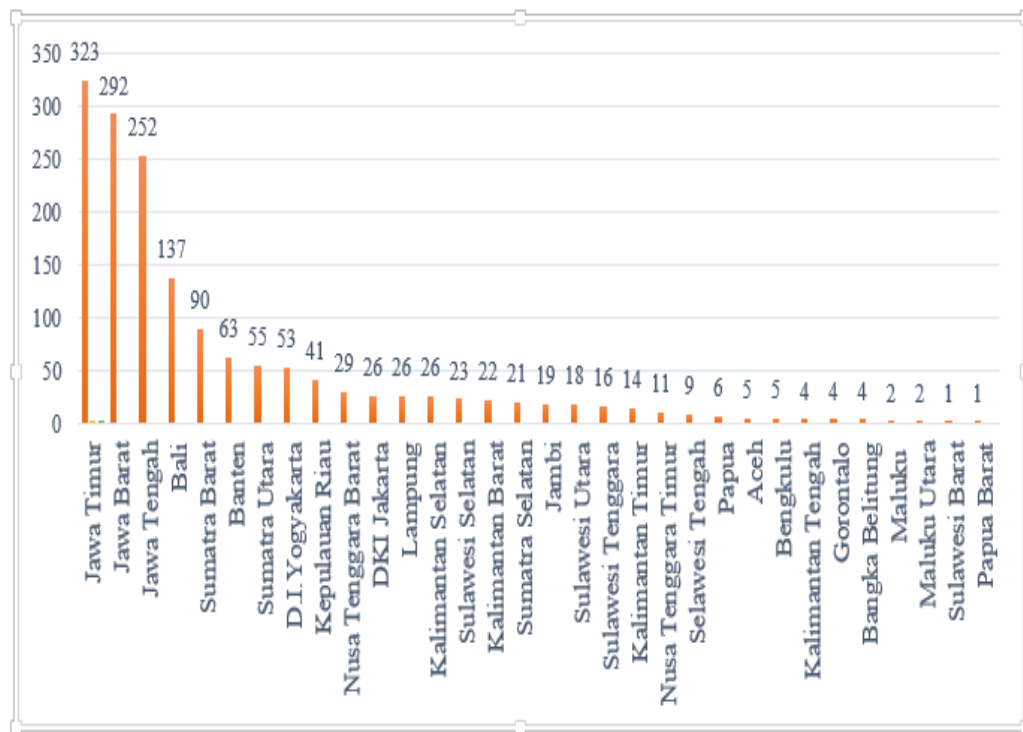
Kredit yang disalurkan oleh BPR mempunyai peranan yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena kredit yang disalurkan oleh BPR digunakan oleh pengusaha untuk kegiatan produktif akan memberikan nilai tambah terhadap faktor produksi (Sofyan, 2015). Porsi penyaluran kredit yang disalurkan oleh BPR ke wilayah-wilayah ibukota dan kecamatan telah mengambil peran dalam perbaikan distribusi pendapatan dan kegiatan ekonomi (Ganggasari dan Budiasih, 2014).

Tabel 1
Perkembangan Jumlah BPR dan Jumlah Kantor di Indonesia Tahun 2012-2016
(Unit)

Katagori	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah BPR	1.653	1.635	1.643	1.637	1.634
Jumlah Kantor BPR	4.425	4.678	4.895	5.100	6.102

Sumber: Bank Indonesia, 2017

Gambar 1 menunjukkan jumlah BPR di Indonesia masih timpang antar daerah. Daerah yang memiliki jumlah BPR yang tinggi umumnya merupakan daerah dengan potensi sumber daya manusia yang tinggi, perekonomian daerahnya maju, literasi keuangan daerah tinggi, dan sosial budaya daerah tersebut mendukung perkembangan BPR. Daerah yang memiliki jumlah BPR rendah didominasi oleh daerah di wilayah bagian timur Indonesia dimana jumlah potensi penduduk rendah, literasi keuangan daerahnya rendah dan keadaan sosial budaya yang kurang mendukung perkembangan BPR. Pemerintah perlu memperhatikan perkembangan BPR mengingat pentingnya peran BPR dalam mendorong perekonomian daerah dan memperbaiki distribusi pendapatan.



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan 2016

Gambar 1.
Jumlah BPR Berdasarkan Lokasi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016

Provinsi Bali berada pada urutan ke-4 dengan jumlah 137 BPR. Jumlah ini sudah cukup baik apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Jumlah BPR peringkat ke-4 nasional diharapkan akan meningkatkan peran BPR dalam perekonomian Bali melalui penyaluran kredit. Melalui pemberian kredit ini, sektor rumah tangga/perusahaan dapat menjalankan aktivitas perekonomian/bisnis, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi pihak-pihak lain. Kredit yang diberikan kepada sektor tersebut dianggap penting untuk menjalankan tugasnya untuk operasi bisnis dan investasi yang akan membantu dalam mencapai pertumbuhan output yang nyata, yang akan tercermin secara positif pada ekonomi negara secara keseluruhan yang akhirnya

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Rabab'ah, 2015). Hal inilah yang membuat BPR berperan penting dalam menggerakkan sektor perekonomian di Provinsi Bali (Wulandari, 2014).

Tabel 2
Jumlah Kantor BPR Berdasarkan Kabupaten/kota di Provinsi Bali Tahun 2016
(Unit)

No	Kabupaten/kota	Kantor		Jumlah Kantor
		KP	KC	
1	Kab. Badung	52	14	66
2	Kab. Bangli	3	1	4
3	Kab. Buleleng	7	5	12
4	Kab. Gianyar	28	9	37
5	Kab. Jembrana	1	3	4
6	Kab. Karangasem	4	0	4
7	Kab. Klungkung	5	4	9
8	Kab. Tabanan	24	6	30
9	Kota Denpasar	13	12	25
10	Kab./ Kota Lainnya	0	0	0
Total		137	54	191

Sumber: *Bank Indonesia, 2017*

Tabel 2 Menunjukkan Kabupaten Badung memiliki jumlah kantor BPR tertinggi sebanyak 66 kantor. Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem memiliki jumlah BPR terendah sebanyak 4 kantor. Hal ini menunjukkan BPR berkembang dengan baik di daerah yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi dan perekonomian daerah yang maju. Pada Tabel 2 dapat kita lihat kabupaten atau kota yang merupakan wilayah Sarbagita memiliki jumlah kantor BPR yang tinggi jika

dibandingkan dengan daerah diluar Sarbagita. Hal ini menunjukkan bahwa BPR ikut berperan dalam perekonomian daerah melalui penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR. Oleh karena itu penting dilukukannya upaya untuk meningkatkan penyaluran kredit yang dilakukan BPR untuk meningkatkan peran BPR dalam perekonomian Bali.

Tabel 3 menunjukkan pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh BPR di Provinsi Bali pada tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penyaluran kredit yang dilakukan oleh BPR di Provinsi Bali mengingat sumber utama pendapatan BPR berasal dari bunga kredit yang diperoleh. Penurunan persentase pertumbuhan kredit dikarenakan kegiatan perekonomian global yang bias ke bawah, sebagai dampak pemulihan ekonomi global yang masih melambat dan tidak merata, sehingga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin pada perekonomian sektor swasta dan juga belanja modal pemerintah yang belum bergerak kencang sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.

Pendapatan terbesar suatu bank berasal dari pendapatan bunga atas kredit yang diberikan ke masyarakat (Naceur, 2003) dan sumber dana terbesar suatu bank juga berasal dari masyarakat atau DPK. Dana Pihak Ketiga atau yang sering disebut DPK adalah dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Arsandi, 2010). Dengan adanya DPK yang besar, kepercayaan masyarakat akan bank meningkat sehingga akan meningkatkan minat masyarakat untuk meminjam dana selanjutnya penyaluran kredit akan meningkat (Nugraheni, 2013). Dana pihak ketiga dapat membantu meningkatkan kekuatan permodalan bank. Bisnis perbankan harus memiliki permodalan yang kuat

agar dapat cepat berkembang dan merupakan suatu keharusan. (Lindiasari, 2015). Peranan permodalan bank sangat penting untuk meningkatkan kemampuan bank mealakukan kegiatan operasionalnya (Siamat, 2005:287).

Tabel 3
Posisi Penyaluran Kredit, Dana Pihak Ketiga, dan Jumlah Aset BPR di Provinsi Bali pada Tahun 2012-2017

Tahun	Posisi Kredit BPR (Miliar Rupiah)	Perkembangan (%)	DPK BPR (Miliar Rupiah)	Aset BPR (Miliar)
2012	4.754	37,96	4,054	6.326
2013	5.941	24,96	4,958	7.701
2014	7.120	19,84	5.905	9.380
2015	8.279	16,27	7.007	11.313
2016	9.032	9,09	8.354	13.074
(trw.III)2017	9.302	2,98	8.724	13.222
Total	44.428	112,12	39.002	54.690
Rata-rata	7.404	18,52	6.500	9.115

Sumber: *Bank Indonesia, 2017*

DPK yang dihimpun BPR di Provinsi Bali pada tahun 2012 sampai tahun 2017 terus mengalami peningkatan dari Rp.4.054 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp.8.724 miliar. Peningkatan jumlah DPK juga diiringi dengan meningkatnya jumlah aset BPR di Bali. Pada tahun 2012 jumlah aset BPR di Bali sebesar Rp.6.326 miliar menjadi Rp.13.222 miliar pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan kinerja BPR yang cukup positif, sehingga dapat membantu likuiditas BPR dalam menyalurkan kredit serta memenuhi cadangan wajib minimum yang harus dimiliki bank. Selain itu, belum

adanya publikasi mengenai BPR yang berada di bawah pengawasan khusus Bank Indonesia dengan nilai cadangan wajib minimum yang yang harus dimiliki BPR di bawah 8 persen menunjukkan likuiditas BPR di Bali cukup baik, sehingga optimalisasi penyaluran kredit harus dilakukan oleh BPR untuk mengurangi beban operasional BPR dalam membayar bunga tabungan dan deposito.

Sumber-sumber dana BPR berasal dari dalam BPR, dari lembaga lain, dan dari masyarakat. Permodalan BPR dari modal BPR berasal dari setoran pemegang saham dan laba tahun sebelumnya yang tidak dibagi kepada para pemegang saham dengan tujuan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Dana yang bersumber dari lembaga lain merupakan tambahan jika mengalami kesulitan dalam mencari sumber dana dari dalam BPR dan dari masyarakat. Sumber dana terpenting yang harus dimiliki BPR bersumber dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk kegiatan operasional BPR. Dana BPR yang bersumber dari masyarakat sering disebut sebagai dana pihak ketiga yang sering disingkat DPK. Dana pihak ketiga yang dihimpun BPR berasal dari tabungan dan deposito (Bhegawati, 2010).

Penyaluran kredit yang dilakukan BPR tidak hanya dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), tetapi juga dari modal bank. Modal bank yang dimaksud adalah modal setoran dari pemegang sahamnya. Pihak perbankan juga dapat menggunakan cadangan-cadangan laba yang belum digunakan untuk meningkatkan likuiditas bank.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Risiko kredit merupakan salah satu faktor penting perilaku pemberian pinjaman oleh bank (Cucinelli, 2015). *Non Performing*

Loan atau yang sering disebut NPL merupakan kredit bermasalah yang menjadi indikator untuk mengukur kinerja dan fungsi bank (Messai, 2013).

Tabel 4
Perkembangan *Non Performing Loan*, *Loan to Deposit Ratio* dan *BI Rate* BPR di Provinsi Bali Tahun 2012-2017

Tahun	<i>Non Performing Loan</i> (NPL) (%)	<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) (%)	<i>BI Rate</i> (%)
2012	2,17	79,05	5,75
2013	2,06	87,40	7,50
2014	2,73	78,79	7,75
2015	2,96	76,33	7,50
2016	6,71	74,58	4,75
2017	7,26	74,86	4,25
Rata-rata	3,98	78,50	6,25

Sumber: *Bank Indonesia, 2017*

Non performing loan merupakan kredit bermasalah yang menggambarkan situasi persetujuan pengembalian kredit yang mengalami resiko kegagalan pengembalian kredit, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Kerugian potensial yang dimaksud dapat berupa penghapusan kredit sehingga menimbulkan beban penghapusan kredit oleh bank dan hal ini akan mengurangi laba bersih bank (Permatasari dan Retno, 2014). Banyaknya NPL pada perbankan di suatu negara juga dapat mengakibatkan stagnansi ekonomi (Zablun, 2015). Menurut Roman dan Şargu (2013), rasio kredit bermasalah terhadap total rasio pinjaman digunakan untuk mengukur kualitas pinjaman dan kualitas aset bank yang ditunjukkan oleh NPL.

NPL menjadi pertimbangan bagi bank untuk menyalurkan kredit pada periode berikutnya.

Tabel 4 menunjukkan perkembangan NPL pada BPR di Provinsi Bali dari tahun 2012 sampai tahun 2017 cenderung meningkat, bahkan pada tahun 2017 NPL BPR di Provinsi Bali telah melebihi *threshold* 5 persen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jika BPR di Provinsi Bali memiliki persentase NPL lebih dari *threshold* 5 persen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka BPR di Provinsi Bali dapat dikatakan kurang sehat. NPL yang tinggi akan menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh BPR dikarenakan banyak debitur yang tidak mampu membayar kredit.

NPL pada BPR di Provinsi Bali dari tahun 2012 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan dari 2,17 persen menjadi 7,26 persen. Meningkatnya NPL pada BPR di Provinsi Bali disebabkan oleh belum optimalnya restrukturisasi kredit, dimana keterbatasan sumberdaya manusia yang kompeten terutama untuk mengambil keputusan usaha pada BPR dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana bank dan memutuskan pemberian kredit berdasarkan manajemen resiko kredit yang baik. Peningkatan NPL BPR di Provinsi Bali secara signifikan pada tahun 2017 diakibatkan belum stabilnya perekonomian Indonesia sebagai akibat dampak pemulihan ekonomi global, sehingga mengurangi kemampuan nasabah BPR di Provinsi Bali dalam memenuhi kewajibannya membayar kredit.

Keadaan likuiditas BPR juga penting diperhatikan dalam upaya BPR menyalurkan kredit. Keadaan likuiditas BPR dapat dilihat dari *Loan to Deposit Ratio* atau yang sering disebut LDR yang merupakan rasio yang menggambarkan seberapa

besar kemampuan bank dalam membayar dana yang dititipkan oleh masyarakat apabila kredit yang disalurkan mengalami masalah.

LDR merupakan perbandingan dana pihak ketiga dengan kredit atau sejenis kredit, yang apabila tidak disalurkan menyebabkan banyak dana yang menganggur. Banyaknya dana yang menganggur akan mengakibatkan perolehan laba menjadi rendah (Adusei, 2015). Menurut Polat dan Al-Khalaf (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa LDR adalah ukuran dari likuiditas dan menunjukkan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman tambahan.

Tabel 4 menunjukkan LDR pada BPR di Provinsi Bali pada tahun 2012 sampai tahun 2017 berfluktuasi. Besar LDR pada BPR di Provinsi Bali dari tahun 2012 sampai tahun 2017 kurang dari persentase yang dianjurkan oleh Bank Indonesia. Anjuran persentase LDR oleh Bank Indonesia, persentase LDR sebaiknya berada dikisaran 85 persen sampai 110 persen (Manurung dan Rahardja, 2004: 112). Nilai LDR BPR di Provinsi Bali yang relatif rendah yaitu rata-rata 78,50 persen menunjukkan kelebihan kapasitas dana yang siap dipinjamkan, sehingga untuk menjaga LDR BPR di Provinsi Bali berada pada tingkat 85 persen sampai dengan 110 persen, penting bagi BPR untuk menyalurkan kelebihan dananya dalam bentuk kredit.

Kredit yang disalurkan oleh bank sangat bergantung pada tingkat BI *rate*. Ketika Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan BI *rate* maka suku bunga tabungan dan deposito akan meningkat dan diikuti oleh meningkatnya suku bunga kredit. Meningkatnya suku bunga kredit dapat menurunkan minat masyarakat untuk mengajukan kredit yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah kredit yang dapat

disalurkan oleh BPR. *BI rate* adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang menggambarkan arah kebijakan yang akan diambil oleh Bank Indonesia (Farida, 2014).

Pada Tabel 4 menunjukkan *BI rate* dari tahun 2012 sampai tahun 2017 berfluktuasi di mana *BI rate* tertinggi sebanyak 7,75 persen pada tahun 2014 dan *BI rate* terendah sebanyak 4,25 persen pada tahun 2017. Penurunan *BI rate* menjadi 4,25 persen pada tahun 2017 disebabkan oleh inflasi hingga pertengahan tahun 2017 lebih rendah dari perkiraan BI. Defisit transaksi berjalan (*current account deficit/CAD*) tetap terkendali, kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau *Federal Reserve (The Fed)* menaikkan suku bunga, dan harapan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan akan mendorong penyaluran kredit perbankan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan (www.bi.go.id, 2018).

Peran BPR dalam penyaluran kredit untuk mendorong pertumbuhan sektor riil di Provinsi Bali sangatlah penting. Hal ini disebabkan oleh kredit yang disalurkan oleh BPR berupa kredit produktif dan kredit konsumtif, sehingga dapat menggerakkan sektor riil dan mendatangkan manfaat bagi investor, pemerintah, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kredit produktif BPR berupa kredit modal kerja yang disalurkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sedangkan kredit konsumtif yang disalurkan oleh BPR berupa kredit konsumsi yang dapat menambah daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian. Dengan demikian, BPR mempunyai arah yang spesifik pada rakyat dalam artian melakukan aktivitasnya menggunakan uang kartal. Kegiatan yang dilakukan masyarakat menengah ke bawah

jumlahnya relatif besar dibandingkan dengan bank-bank berskala besar, sehingga sumbangan terhadap pendapatan nasional lebih besar dari pada bank berskala besar. Oleh karena itu bank perkreditan rakyat berperan penting dalam pembangunan ekonomi (Wiwin, 2012).

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berbentuk asosiatif. Lokasi penelitian ini adalah di Provinsi Bali, yaitu pada BPR yang ada di Provinsi Bali. Dipilihnya BPR di Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian dikarenakan peran BPR dalam penyaluran kredit untuk mendorong pertumbuhan sektor riil di Provinsi Bali sangatlah penting. Hal ini disebabkan oleh kredit yang disalurkan BPR berupa kredit produktif dan kredit komsumtif, sehingga dapat menggerakkan sektor riil.

Penelitian ini terdiri dari 4 *independent variable* yaitu DPK, NPL, LDR dan BI rate. *Dependent variable* pada penelitian ini adalah jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dalam bentuk laporan tahunan periode 2008 triwulan I sampai 2017 triwulan III. Adapun data yang digunakan, yaitu: data dana pihak ketiga, *non performing loan*, *loan to deposit ratio*, BI rate dan Jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR di Provinsi Bali periode 2008 triwulan I - periode 2017 triwulan III.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan wawancara mendalam (*indepthinterview*). Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Sebelum menggunakan teknik analisis regresi

linier berganda terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan model regresi layak untuk digunakan. Persamaan model regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada persamaan 1 (Gujarati, 2003: 265).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu_i \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- Y = kredit yang disalurkan BPR di Provinsi Bali
- X₁ = dana pihak ketiga
- X₂ = *non performing loan*
- X₃ = *loan to deposit ratio*
- X₄ = *BI rate*
- β_{1,2,3,4} = koefisien Regresi
- μ_i = kesalahan Pengganggu
- β₀ = konstanta

Pengaruh variabel-variabel bebas (X) yaitu DPK, NPL, LDR dan *BI rate* terhadap variabel terikat (Y) yaitu jumlah kredit yang disalurkan pada BPR di Provinsi Bali diperoleh persamaan sebagai berikut.

Y	=	-54,373	+	1,126X ₁	-	131,131X ₂	+	2,431X ₃	+	86,349X ₄(2)
Se	=	(0,020)		(25,145)		(6,727)		(39,967)		
t	=	(57,668)		(-5,215)		(0,361)		(2,161)		
Sig	=	(0,000)		(0,000)		(0,720)		(0,038)		
R ²	=	0,993		F= 1241.947						

Uji Asumsi Klasik

Normalitas data dalam penelitian sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu uji asumsi klasik yang pertama harus dilakukan adalah memastikan data yang digunakan berdistribusi normal, selanjutnya data yang digunakan harus tidak

menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas dan korelasi antara tahun sebelumnya (t-1) dengan data sesudahnya (t1). Hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan agar estimasi yang dibuat baik adalah variasi pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 5
Pengujian Normalitas dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	221.92955125
Most Extreme Differences	Absolute	.161
	Positive	.161
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		1.005
Asymp. Sig. (2-tailed)		.264

Sumber: *Data Diolah, 2018*

Hasil pengujian data menggunakan SPSS menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi dengan normal dengan nilai 0,264 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga layak dilakukan analisis lebih lanjut.

Tabel 6
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Constant		
DPK	.648	1.544
NPL	.896	1.116
LDR	.758	1.319
BI RATE	.666	1.501

Sumber: *Data Diolah, 2018*

Hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan *Tolerance* dan VIF menunjukkan nilai *Tolerance* semua variabel $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Hasil ini menggambarkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas. Artinya model regresi yang digunakan bebas dari adanya kolerasi diantara variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 7
Hasil Pengujian Durbin Watson

Model	Durbin-Watson
1	1.961

a.predictors: (Constant), DPK, NPL, LDR, BI_RATE

b.Dependent Variable: KREDIT

Sumber: *Data Diolah, 2018*

Pengujian autokorelasi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilainya sebanyak 1,961. Nilai d_U untuk 39 sampel menggunakan 4 *independent variable* sebesar 1,7215 dengan nilai $4-d_U$ sebesar 2,039. Nilai $d_U < DW < 4-d_U$ ($1,7215 < 1,961 < 2,039$) menggambarkan data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari autokorelasi.

Tabel 8
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	762.076	425.030		1.793	.082
DPK	-.019	.013	-.306	-1.495	.144
1 NPL	-.912	16.645	-.010	-.055	.957
LDR	-5.695	4.453	-.242	-1.279	.210
BI_RATE	-8.065	26.457	-.061	-.305	.762

Sumber : *Data Diolah, 2018*

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji *Glejser* menunjukkan nilai signifikansi variabel DPK sebesar 0,144 lebih besar dari 0,05 sehingga DPK bebas dari heteroskedastisitas, variabel NPL sebesar 0,957 lebih besar dari 0,05 sehingga NPL bebas dari heteroskedastisitas, variabel LDR sebesar 0,210 lebih besar dari 0,05 sehingga LDR bebas dari heteroskedastisitas, dan BI *rate* sebesar 0,726 lebih besar dari 0,05 sehingga BI *rate* bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Secara Simultan

Hasil pengolahan data menunjukkan signifikansi nilai $F < 0,05$ sehingga secara simultan variabel dana pihak ketiga (X_1), *non performing loan* (X_2), *loan to deposit ratio* (X_3), dan BI *rate* (X_4) secara serempak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan (Y) oleh BPR di Provinsi Bali.

Tabel 9
Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	273462730.166	4	68365682.542	1241.947	.000 ^b
	Residual	1871603.577	34	55047.164		
	Total	275334333.744	38			

Sumber : *Data Diolah, 2018*

Nilai $R^2=0,993$ berarti bahwa besarnya variasi jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR di Provinsi Bali 99,3 persen dipengaruhi oleh variasi variabel DPK, NPL, LDR dan BI *rate*. Jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR di Provinsi Bali juga

dipengaruhi sebesar 7 persen oleh variasi variabel yang tidak dimagunakan dalam penelitian ini.

Pengujian Secara Parsial

Pengujian variabel secara parsial atau induvidu bertujuan untuk melihat pengaruh *independent variable* dengan *depentdent variable*. Berpengaruhnya *independent variable* terhadap *depentdent variable* dilihat dari besarnya signifikansi dengan asumsi *independent variable* lainnya dianggap konstan. Hasil pengujian secara parsial atau induvidu seperti pada Tabel 10.

Tabel 10
Hasil Pengujian Secara Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	Constant	-54.373	642.058		
1	DPK	1.126	.020	1.013	57.668
	NPL	-131.131	25.145	-.078	-5.215
	LDR	2.431	6.727	.006	.361
	BI_RATE	86.349	39.967	.037	2.161

a. Dependent Variable: KREDIT

Sumber : *Data Diolah, 2018*

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan hasil nilai signifikansi variabel dana pihak ketiga lebih kecil dari 0,05 artinya dana pihak ketiga berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS nilai koefisien DPK sebesar 1.126 memiliki arti jika DPK meningkat sebesar satu miliar rupiah, maka jumlah kredit yang disalurkan BPR di Provinsi Bali meningkat sebesar

1,126 miliar rupiah, dengan asumsi *variable non performing loan*, *loan to deposit ratio*, dan *BI rate* konstan.

Penelitian dilakukan oleh Sofyan (2015) mendukung hasil penelitian ini dimana, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap kredit yang disalurkan. lokasi penelitian yang dilakukan oleh Sofyan (2015), berlokasi di Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Magetan tahun 2008 sampai tahun 2014. Semakin tinggi jumlah DPK yang dapat dikumpulkan dari masyarakat oleh BPR maka semakin tinggi penyaluran kredit kepada masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam menyalurkan kredit harus melakukan optimalisasi penghimpunan DPK. Hasil ini sesuai dengan penelitian Galih (2011), DPK berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan bank di Indonesia. Semakin tinggi dana pihak ketiga yang dihimpun maka jumlah kredit yang disalurkan juga akan meningkat.

Variabel NPL nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 artinya *non performing loan* berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap jumlah kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. NPL secara parsial berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap jumlah kredit yang disalurkan (Y) oleh BPR di Provinsi Bali. Nilai Koefisien NPL sebesar - 131,131 memiliki arti bahwa apabila NPL meningkat sebesar 1 persen, maka jumlah kredit yang disalurkan oleh BPR di Provinsi Bali menurun sebesar 131,131 miliar rupiah, dengan asumsi variabel lain, yaitu dana pihak ketiga, *loan to deposit ratio* dan *BI rate* konstan. Hasil penelitian

ini sesuai dengan penelitian Putra Ogy dan Surya Dewi Rustariyuni (2015), dan Pratiwi dan Sudirman (2013),

Variabel *loan to deposit ratio* nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 artinya *variabel loan to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. LDR tidak memiliki pengaruh terhadap jumlah kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. Hal ini terjadi disebabkan oleh tingkat LDR yang tinggi, bank tidak akan mengambil risiko likuiditas yang nantinya akan menurunkan kinerja perbankan. Oleh karena itu, meskipun LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank telah mampu menyalurkan kreditnya namun jika sudah mencapai tingkat dimana dapat membahayakan kinerjanya, bank akan mengambil keputusan untuk tidak menyalurkan kredit agar likuiditas BPR tetap terjaga sehingga BPR tetap mampu untuk mengembalikan dana yang dititipkan masyarakat apabila kredit yang disalurkan BPR mengalami kegagalan atau bermasalah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nugraheni (2013), dan Prasetya (2013)

Variabel *BI rate* nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 artinya *BI rate* berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. *BI rate* berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif dengan nilai koefisien *BI rate* sebesar 86,349 memiliki arti bahwa apabila Bank Indonesia menaikkan *BI rate* sebesar satu persen, jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali tahun 2008 triwulan I sampai 2017 triwulan III naik sebesar 86,349 miliar rupiah dengan asumsi variabel lain, yaitu DPK, NPL, dan LDR konstan. *BI rate* berpengaruh signifikan dan memiliki arah

positif sesuai hasil penelitian tidak didukung oleh teori yang ada dimana teori yang ada menyatakan bahwa *BI rate* akan menyebabkan suku bunga kredit naik dan menurunkan keinginan masyarakat untuk mengajukan kredit.

Penelitian ini mendapatkan hasil yang berlawanan dengan teori yang ada dikarenakan ketika *BI rate* meningkat, suku bunga tabungan dan deposito juga ikut meningkat, sehingga untuk membayar bunga tabungan dan deposito, BPR tetap harus menyalurkan kredit, dikarenakan kredit merupakan sumber utama pendapatan BPR. Jadi meskipun *BI rate* naik jumlah kredit yang disalurkan BPR juga naik. Hal ini juga didukung oleh keadaan pasar dimana permintaan akan kredit terus meningkat dari tahun 2008.I-2017.III.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil wawancara mendalam terhadap Bapak I Ketut Wardana selaku Komisaris BPR Sinar Kuta Mulia yang menyatakan bahwa ketika *BI rate* naik dan suku bunga deposito naik maka dana pihak ketiga yang dihimpun BPR meningkat. Beban operasional BPR untuk membiayai bunga tabungan dan deposito juga meningkat, sehingga BPR harus menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun untuk mengurangi beban operasional BPR dengan cara meningkatkan penyaluran kredit. Selain itu ketika *BI rate* naik, dan suku bunga deposito naik masyarakat justru menjadikan jaminan deposito untuk mengambil kredit, sehingga meskipun *BI rate* naik jumlah kredit yang disalurkan BPR juga naik.

Hasil penelitian dan wawancara mendalam yang dilakukan sesuai dengan hasil yang dikemukakan oleh Pratama dan Rustariyuni (2015), dan Arista (2014) dimana *BI*

rate berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap jumlah kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat.

SIMPULAN DAN SARAN

Analisis data statistik yang dilakukan menggunakan SPSS memperoleh hasil seperti yang diuraikan diatas. Secara ringkas dapat kita simpulkan bahwa pengujian secara serempak pada taraf nyata (α)= 0,05 menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, *non performing loan*, *loan to deposit ratio*, dan *BI rate* secara serempak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. Hasil pengolahan data secara parsial diperoleh hasil bahwa dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. *Non performing loan* secara parsial berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang negatif terhadap kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. *Loan to deposit ratio* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali. *BI rate* berpengaruh signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap kredit yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Bali.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disarankan beberapa hal antara lain sebagai berikut.

- 1) BPR seharusnya lebih mengoptimalkan penyaluran kredit dengan meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga. Meningkatkan dana pihak ketiga dapat dilakukan oleh BPR di Provinsi Bali dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan dan

memberikan insentif bagi nasabah yang mau menabung, misalnya dengan memberikan hadiah-hadiah agar menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya kepada BPR di Provinsi Bali. Besar kecilnya jumlah dana pihak ketiga yang diperoleh BPR di Provinsi Bali akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah kredit yang dapat disalurkan BPR.

- 2) BPR hendaknya menjaga *non performing loan* agar tetap berada pada batas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 5 persen. Untuk menjaga *non performing loan* agar tidak terus meningkat, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh manajemen BPR adalah dengan menetapkan manajemen resiko pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian yang ketat, selektif dalam memilih calon debitur, dan memperketat sistem administrasi dan pengawasan kredit.
- 3) BPR hendaknya menjaga tingkat *loan to deposit ratio* sesuai dengan anjuran Bank Indonesia yaitu berkisar antara 85 persen sampai 110 persen untuk menjaga likuiditas BPR aman, sehingga penyaluran kredit BPR dengan menggunakan dana pihak ketiga yang terkumpul tidak menambah beban operasional BPR dengan lebih banyak membayar bunga tabungan deposito daripada menerima bunga kredit. Dengan mempertahankan tingkat *loan to deposit ratio* pada batas yang dianjurkan oleh Bank Indonesia, BPR juga bisa mengembalikan dana yang dititipkan masyarakat apabila kredit yang disalurkan BPR mengalami masalah.
- 4) BPR hendaknya tetap menjadikan BI *rate* sebagai acuan menetapkan tingkat suku bunga tabungan, deposito dan kredit, akan tetapi juga disesuaikan dengan kemampuan likuiditas BPR. Dalam menentukan suku bunga tabungan dan deposito

BPR harus memperhitungkan likuiditas yang dimiliki dengan memperhitungkan tambahan pendapatan yang diterima melalui penyaluran kredit, sehingga likuiditas BPR tetap terjaga dan usaha BPR dapat berkembang pesat.

- 5) Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan literasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui, mengerti dan mau menggunakan jasa bank. Hal itu dapat dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi pentingnya menggunakan bank dan manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat.

REFERENSI

- Adusei, Michael. 2015. General & Applied Economics Research Article Bank Profitability: Insights from the Rural Banking Industry in Ghana. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, Vol 3: 1078270.
- Akotey, Joseph Oscar. 2011. Financial Performance of Rural Banks in Ghana: A Case Study of Naara Rural Bank. *Catholic University College of Ghana: Faculty of Economics and Business Administration*, Vol 14 (3), 286-302.
- Angeles, Luis. 2015. Credit Expansion and the Economy. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, Vol 22 1350-4851.
- Anthony, Orji. 2012. Bank Savings and Bank Credits in Nigeria: Determinants and Impact on Economic Growth. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 2(3) 357-372.
- Allow, Albertus Girik. 2016. Liberalisasi Keuangan dan Pembangunan Ekonomi: Belajar dari Krisis Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2) 126- 134.
- Arsandi, Desi. 2010. Analisa Penawaran Kredit pada Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen*. Program Studi Manajemen Perbankan: Universitas Gunadarma.

- Banga, S. 2013. Socio-Economic Significance of Commercial Banks in India: With Special Emphasis on Public Sector Banks. *International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences*, 2(1) 1-22.
- Bank Indonesia. 2018. Indonesia *Targeting Fremwork*. www.bi.go.id. Diakses pada 11 Januari 2018.
- . 2008. Kebijakan Ekonomi Regional Provinsi Bali.
- .2009. Kebijakan Ekonomi Regional Provinsi Bali.
- .2010. Kebijakan Ekonomi Regional Provinsi Bali.
- .2011. Kebijakan Ekonomi Regional Provinsi Bali.
- .2012. Kebijakan Ekonomi Regional Provinsi Bali.
- .2013. Kebijakan Ekonomi Regional Provinsi Bali.
- .2014. Kebijakan Ekonomi Regional Provinsi Bali.
- .2015. Kebijakan Ekonomi Regional Provinsi Bali.
- .2016. Kebijakan Ekonomi Regional Provinsi Bali.
- .2017. Kebijakan Ekonomi Regional Provinsi Bali.
- Buyinza, Francois, J. 2010. Determinants of Profitability of Commercial Banks in Sub Saharan Africa Countries. Linze Austria: Johanssen Kepler University. Vol 5(9) 1916-9728.
- Bhegawati, Desak Ayu Sriary. 2010. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Suku Bunga Kredit, Inflasi, dan Non Performing Loan Terhadap Jumlah Kredit yang Disalurkan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali. *Tesis: Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Udayana*.
- Cucinelli, Doriana. 2015. The Impact of Non-performing Loans on Bank Lending Behavior: Evidence from the Italian Banking Sector. *Eurasian Journal of Business and Economics*, Vol 8(16) 59-71.
- Ekinci, Aykut. 2016. The Effect of Credit and Market Risk on Bank Performance: Evidence from Turkey. *International Journal of Economics and Financial Issue*, 6(2) 2146-4138.

- Farida, Nurul. 2015. Analisis Penyaluran Kredit yang Dimoderasi oleh Non Performing Loan. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS, Surabaya.
- Galih, Adhitya Tito. 2011. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Asset, dan Loan to deposit Ratio terhadap jumlah Penyaluran Kredit pada Bank di Indonesia. Universitas Diponegoro.
- Ganggasari Ni Wayan dan Budiasih I.G.A.N. 2014. Pengaruh Capital Adequacy Ratio Dan Loan to Deposit Ratio Pada Penyaluran Kredit Dengan Non Performing Loan sebagai Variabel Pemoderasi. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 6(2) 319-339.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim, M. 2010. Performance Evaluation of Regional Rural Banks in India. *International Business Research*, 3(4) 1913-9012.
- Junita, Sari dan Nyoman Abundanti. 2016. Pengaruh DPK, ROA, Inflasi, dan Suku Bunga SBI Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(11).
- Lindiasari, Palupi. 2015. Analisis Profitabilitas Bank Umum *Go Public* di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis: Faktor Internal dan Eksternal. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(2).
- Manurung, Mandala, dan Prathama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta: Penerbit FE UI.
- Messai, Ahlem Selma. 2013. Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(4)
- Naceur, S. B. 2003. The Determinants of the Tunisian Banking Industry Profitability: Panel Evidence. *International Journal of Economics and Finance* 7(1).
- Nugraha, dan Marino San Wilman. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit sebagai Indikator Peranan Bank dalam Mendorong Perekonomian di Indonesia (Studi Pada Bank Berdasarkan Struktur Kepemilikan Periode Sesudah Krisis Global Tahun 2008). *Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Nugraheni, Putri. 2015. Pengaruh Faktor Internal Bank dan Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4)

- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Permasalahan dan Tantangan BPR/ BPRS. <http://www.perbarindo.or.id>. Diakses 6 Oktober 2017.
- Permatasari, Ika dan Retno Novitasari. 2014. Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, (7) 52-59.
- Polat, Ali, and Al-khalaf, Hassan. 2014. What Determines Capital Adequacy in the Banking System of Kingdom of Saudi Arabia? A Panel Data Analysis on Tadawul Banks. *Journal of Applied Finance & Banking*, 4(5).
- Pratama, Putra Ogy dan Rustariyuni Surya Dewi. 2015. Pengaruh DPK, BI Rate, dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada BPR Di Provinsi Bali Tahun 2009-2014. *E-Jurnal EP Unud*, 4(5).
- Pratiwi, Ida Ayu Meisya dan Sudirman, Wayan. 2013. Variabel-variabel yang Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja (UMKM) di Bali 2002.I-2013.I. *E-Jurnal EP*, 3(3).
- Rabab'ah, Mwfag. 2015. Factors Affecting the Bank Credit: An Empirical Study on the Jordanian Commercial Banks. *International Journal of Economics and Finance*, 7(5).
- Roman, A., dan Şargu, A. C. 2013. Analysing the financial soundness of the commercial banks in Romania: An approach based on the Camels framework. *Procedia Economics and Finance*, 6(2).
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Kelima. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Silvia, Faria F, Crocco M, Paulo Rezende L, dan Rodriguez Fuentes C.J. 2012. Banks and Regional Development: An Emperical Analysis on the Determinants of Credit Availability in Brazilian Regions. *Bulletin of Indonesia Economic studies*, 48(5).
- Sofyan, Moh. 2015. Pengaruh LDR, CAR, NPL, BOPO, ROA, dan DPK terhadap Kredit Pada BPR di Kabupaten Magetan: Periode Pengamatan Tahun 2008 – 2014. *Jurnal Eksekutif*, Vol 12.
- Suhartini, Atik Mar'atis dan Yuta Ropika. 2014. Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (Umk) Serta Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2) 137-144.

- Wiwin Setyari. 2012. Evaluasi Dampak Kredit Mikro Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Di Indonesia: Analisis Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 5(2) 141- 150.
- Wulandari, Fitria. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Yang Telag Go Publik. *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
- Zablon, Evusa. 2015. Evaluation of the Factors Leading to Loan Default at Equity Bank, Kenya. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(9) 2222-2855.